

PERAN PROGRAM BANYUWANGI MENGAJAR DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Andhika Wahyudiono

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG, Banyuwangi

E-mail: a-wahyu@untag-banyuwangi.ac.id

Abstract : *The problem of inequality in access and quality of education in Banyuwangi is caused by the unequal distribution of resources, which affects the quality of human resources (HR) and the economy.* The purpose of this study is to analyse inequality in access to education in remote areas and the role of education administration in addressing it. This research methodology uses a qualitative, literature-based approach to analyse inequality in access to education and the impact of education administration on the regional economy. The results of this study show that collaboration between the government, the community and the private sector in the Banyuwangi Mengajar programme is crucial to addressing education inequality in remote areas. The programme successfully has succeeded in improving the capacity of the teaching staff and ensuring equitable distribution of education resources. The research conclusions emphasise that this collaboration plays a crucial role in improving access and quality of education in remote areas. The programme Banyuwangi Mengajar programme can strengthen synergies between parties, ensure equitable distribution of education resources and sustainably reduce education inequality, and sustainably reduce educational inequality. This research highlights the importance of an inclusive approach in education to build a better foundation for economic and social development in the area. a better foundation for economic and social development in underdeveloped areas. underdeveloped areas.

Keywords: *Education Inequality, Education Administration, Collaboration*

Abstrak : *Permasalahan ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Banyuwangi disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata, yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi.* Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil serta peran administrasi pendidikan dalam mengatasinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis pustaka untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan serta dampak administrasi pendidikan terhadap perekonomian daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam *Program Banyuwangi Mengajar* sangat penting untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah terpencil. Program tersebut berhasil meningkatkan kapasitas tenaga pengajar serta memastikan pemerataan sumber daya pendidikan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kolaborasi ini berperan krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah terpencil. *Program Banyuwangi Mengajar* dapat memperkuat sinergi antar pihak, memastikan distribusi sumber daya pendidikan yang adil, dan secara berkelanjutan mengurangi ketimpangan pendidikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam pendidikan untuk membangun fondasi yang lebih baik bagi perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tertinggal.

Kata kunci : Ketimpangan Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Kolaborasi

Pendahuluan

Ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil menjadi masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Penyebab utamanya adalah distribusi sumber daya pendidikan yang belum merata, termasuk ketersediaan guru, fasilitas, dan materi pembelajaran. Ketidakmerataan ini menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut, yang berimbas pada perkembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Administrasi pendidikan memegang peranan penting dalam menyusun kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan tersebut meliputi distribusi sumber daya pendidikan yang lebih adil, pengiriman tenaga pengajar ke daerah terpencil, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Program Banyuwangi Mengajar merupakan salah satu contoh inisiatif pemerintah daerah yang berupaya mengatasi tantangan akses pendidikan di wilayah terpencil. Program ini menegaskan peran administrasi pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Perbaikan distribusi sumber daya pendidikan dan pengiriman tenaga pengajar ke daerah sulit diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM di daerah terpencil. Dampak positif dari hal ini akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik.

Program Banyuwangi Mengajar berfungsi sebagai inisiatif strategis dalam mengatasi tantangan akses pendidikan di daerah terpencil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui distribusi sumber daya yang lebih merata, termasuk pengiriman tenaga pengajar terampil ke wilayah yang kurang terlayani. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan otoritas pendidikan sangat penting dalam meningkatkan akses pendidikan di lokasi yang sebelumnya terabaikan (Sumarmi et al., 2024; Asmayawati et al., 2024).

Selain masalah distribusi sumber daya, perbedaan mutu pendidikan antara daerah maju dan terpencil juga menjadi perhatian. Rendahnya kompetensi tenaga pengajar di wilayah terpencil sering kali menjadi salah satu penyebab utama. Banyak tenaga pengajar di daerah ini belum menerima pelatihan yang memadai, sehingga kualitas pengajaran cenderung kurang optimal. Administrasi pendidikan bertugas untuk

meningkatkan kompetensi tenaga pengajar melalui program pelatihan dan pembekalan. Program pembekalan relawan *Banyuwangi Mengajar* menjadi salah satu contoh di mana para relawan memperoleh materi terkait persiapan mengajar dan manajemen kelas. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan di daerah terpencil, sehingga ketimpangan mutu dapat berkurang.

Perbedaan mutu pendidikan antara daerah maju dan terpencil sering kali disebabkan oleh rendahnya kompetensi pengajar, yang dapat diatasi melalui program pelatihan yang efektif. *Program Banyuwangi Mengajar* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar di daerah terpencil dengan memberikan pelatihan yang relevan, sehingga guru dapat memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan interaksi dengan siswa. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada. Program pelatihan semacam ini terbukti efektif di berbagai negara, di mana pengembangan kompetensi guru berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan (van de Grift et al., 2024; Zhao, 2024). Hasil studi juga menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Ghufron et al., 2024).

Peran administrasi pendidikan dalam mengatasi ketimpangan akses dan mutu pendidikan memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah. Akses pendidikan yang lebih merata dan peningkatan mutu pengajaran akan memberikan peluang bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Peningkatan kualitas SDM ini akan berdampak pada produktivitas ekonomi daerah. Tenaga kerja yang lebih terampil dan kompetitif akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, *Program Banyuwangi Mengajar* bukan hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan ekonomi wilayah yang tertinggal.

Peran administrasi pendidikan sangat krusial dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan tenaga kerja yang lebih terampil. Peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan manajemen sumber daya manusia berbasis sekolah memberikan dampak

signifikan terhadap hasil pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan, sebagaimana terlihat di Vietnam, di mana peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1% berbanding lurus dengan peningkatan skor tes siswa (Dao Van Le & Tuyen Quang Tran, 2024). Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan, seperti technopark di sekolah kejuruan, juga meningkatkan keterampilan siswa sekaligus memperkuat kolaborasi dengan industri (Nasir Usman et al., 2024). Hal ini menegaskan pentingnya peran strategis administrasi pendidikan dalam mengatasi ketimpangan pendidikan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Penelitian berjudul *Peran Program Banyuwangi Mengajar dalam Mengurangi Ketimpangan Akses Pendidikan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah* sangat penting karena membahas masalah ketimpangan pendidikan di wilayah terpencil yang sering terjadi di Banyuwangi. Ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan, seperti ketersediaan guru dan infrastruktur, menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Upaya seperti *Program Banyuwangi Mengajar* sangat relevan karena bertujuan mengirim tenaga pengajar terlatih ke daerah terpencil, memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan kapasitas SDM lokal. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan tenaga kerja yang lebih kompeten dan terampil.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai ketimpangan akses dan mutu pendidikan di daerah terpencil serta peran administrasi pendidikan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan fenomena sosial dari perspektif individu yang terlibat. Dalam konteks ini, metode kualitatif berbasis pustaka berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga

menelaah dampak kebijakan administrasi pendidikan terhadap perekonomian daerah. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan dokumen lain yang relevan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Artikel dari jurnal ilmiah yang terindeks Scopus akan dimanfaatkan dalam memahami teori serta konsep terkait administrasi pendidikan dan distribusi sumber daya di wilayah terpencil.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pemerintah mengenai administrasi pendidikan. *Program Banyuwangi Mengajar* menjadi salah satu studi kasus yang diambil untuk menganalisis bagaimana distribusi tenaga pengajar serta sumber daya pendidikan diterapkan di daerah terpencil. Proses analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu ketimpangan akses pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, serta dampak administrasi pendidikan terhadap perekonomian daerah. Teori yang dijadikan dasar meliputi teori ketimpangan pendidikan, teori administrasi pendidikan, serta teori ekonomi pembangunan untuk menganalisis kaitan antara kebijakan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Pembahasan

Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil dan Peran Administrasi Pendidikan dalam Distribusi Sumber Daya

Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial yang kompleks. Teori Ketidaksetaraan Pendidikan yang dikemukakan oleh James S. Coleman memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami permasalahan ini. Coleman mengemukakan bahwa lingkungan sosial dan ekonomi tempat siswa tumbuh mempengaruhi hasil pendidikan mereka. Pengaruh lingkungan sosial ini menjadi krusial, terutama di daerah terpencil di mana akses terhadap sumber daya pendidikan sering kali terbatas.

Administrasi pendidikan memainkan peran penting dalam distribusi sumber daya pendidikan. Kualitas pengajar, fasilitas sekolah, dan dukungan sosial merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa untuk belajar. Dalam konteks daerah terpencil,

ketimpangan dalam distribusi sumber daya ini dapat memperburuk kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan harus mampu mengidentifikasi daerah - daerah yang membutuhkan perhatian lebih dan mendistribusikan sumber daya secara efektif untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Program Banyuwangi Mengajar hadir sebagai inisiatif konkret dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan bagi guru dan penyediaan materi ajar yang relevan. Langkah-langkah ini sejalan dengan teori Coleman, yang menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang setara.

Kebijakan pendidikan yang inklusif juga menjadi aspek penting dalam teori Coleman. Kebijakan yang mendukung akses setara dapat membantu mengurangi ketimpangan pendidikan. Di daerah terpencil, upaya ini mencakup peningkatan kualitas sekolah, pelatihan bagi tenaga pengajar, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Administrasi pendidikan harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan yang setara bagi semua siswa.

Dampak segregasi dalam sistem pendidikan juga menjadi perhatian Coleman. Segregasi rasial dan ekonomi dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Hal ini sangat relevan di daerah terpencil, di mana keterbatasan akses terhadap sekolah berkualitas sering kali mengarah pada hasil pendidikan yang tidak setara. *Program Banyuwangi Mengajar* berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan akses yang lebih baik dan kualitas pengajaran yang lebih tinggi.

Peningkatan kapasitas administrasi pendidikan dalam mendistribusikan sumber daya, serta pengembangan kebijakan yang adil, akan sangat berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. Inisiatif semacam ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berikut *flow chart* mengenai ketimpangan akses

pendidikan di daerah terpencil dan peran administrasi pendidikan dalam distribusi sumber daya yang dikembangkan :



Gambar 1. Flow Chart Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil dan Peran Administrasi Pendidikan dalam Distribusi Sumber Daya yang dikembangkan

Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil sering kali berakar dari tantangan struktural yang kompleks. Penelitian terbaru menunjukkan tantangan multifaset dalam akses pendidikan dan distribusi sumber daya. Ketimpangan spasial secara signifikan memengaruhi akses pendidikan di wilayah tertentu. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil melibatkan pengembangan sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk mengoptimalkan alokasi dana operasional sekolah, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Sania et al., 2024).

Administrasi pendidikan berperan sentral dalam distribusi sumber daya, terutama dalam konteks ketimpangan akses. Proses pengalokasian sumber daya yang efisien harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah terpencil. *Program Banyuwangi Mengajar* hadir sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah ini, fokus pada peningkatan kualitas pengajaran melalui pelatihan bagi guru dan penyediaan materi ajar yang relevan. Digitalisasi pendidikan juga telah muncul sebagai solusi inovatif, meskipun terdapat kekhawatiran terkait ketimpangan sosio-digital yang perlu diatasi melalui keterlibatan aktif administrasi publik (Jacovkis et al., 2024).

Pendidikan dalam sektor energi panas bumi di Indonesia menunjukkan pentingnya pembelajaran yang terintegrasi dari tingkat sekolah menengah hingga universitas. Kualitas pendidikan di sektor ini dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya lokal dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat (Pambudi & Ulfa, 2024). Administrasi pendidikan harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya pendidikan.

Studi-studi ini menunjukkan hubungan kompleks antara akses pendidikan, alokasi sumber daya, dan integrasi teknologi dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Perlunya intervensi yang ditargetkan menjadi semakin jelas, dengan mempertimbangkan faktor spasial, pemberdayaan gender, dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan hasil pendidikan. Administrasi pendidikan perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang sosial. *Program Banyuwangi Mengajar* merupakan contoh nyata dari komitmen tersebut, mengintegrasikan sumber daya dan kebijakan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik di daerah terpencil.

Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai keadilan pendidikan. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peningkatan Akses Pendidikan, yang ditetapkan pada 16 Agustus 2024 oleh Dinas Pendidikan di Banyuwangi, merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil yang seringkali terpinggirkan dari perhatian.

Administrasi pendidikan memainkan peran penting dalam distribusi sumber daya pendidikan yang lebih merata dan efektif. Peraturan tersebut mencakup berbagai kebijakan dan strategi yang dirancang untuk memperbaiki alokasi sumber daya, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan tenaga pengajar, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal. Kebijakan ini berupaya memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari lokasi geografisnya, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor struktural dan sosial turut memengaruhi akses pendidikan. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan sering kali berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, peran administrasi

pendidikan sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kualitas pengajar di daerah terpencil.

Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil tidak hanya membutuhkan kebijakan yang efektif, tetapi juga kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga semua anak di daerah terpencil dapat menikmati haknya atas pendidikan yang berkualitas. *Program Banyuwangi Mengajar* diharapkan dapat memperkuat sinergi antara semua pihak tersebut, meningkatkan kapasitas tenaga pengajar, dan memastikan distribusi sumber daya pendidikan yang adil dan merata.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengajar melalui Administrasi Pendidikan sebagai Solusi untuk Ketimpangan Mutu Pendidikan

Peningkatan kapasitas tenaga pengajar menjadi langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan mutu pendidikan. *Program Banyuwangi Mengajar* merupakan inisiatif yang dirancang untuk memperkuat kualitas pengajar di daerah tersebut. Program ini mengadopsi pendekatan sistem pendidikan yang diusulkan oleh Ludwig von Bertalanffy, yang menekankan bahwa pendidikan adalah sistem terbuka terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, seperti kurikulum, pengajar, siswa, dan lingkungan.

Sistem pendidikan yang efektif membutuhkan adanya kolaborasi antara semua elemen tersebut. Oleh karena itu, program ini berfokus pada pelatihan intensif bagi guru untuk meningkatkan metode pengajaran, pemahaman kurikulum, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Intervensi ini membantu memastikan bahwa pengajar memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern.

Kebijakan pendidikan yang lebih efektif dirancang dengan mempertimbangkan interdependensi antara elemen-elemen dalam sistem pendidikan. Melalui *Program Banyuwangi Mengajar*, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas pengajaran yang berdampak positif terhadap prestasi siswa. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar, di sisi lain, berkontribusi pada

pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Keterlibatan administrasi pendidikan dalam program ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan dan evaluasi yang berkesinambungan. Melalui pendekatan sistematis, program ini tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan pengajar tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa. Inisiatif ini merupakan contoh konkret bagaimana administrasi pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengatasi ketimpangan yang ada. Berikut *flow chart* peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui administrasi pendidikan sebagai solusi untuk ketimpangan mutu pendidikan yang dikembangkan :



Gambar 2 Flow Chart Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengajar melalui Administrasi Pendidikan sebagai Solusi untuk Ketimpangan Mutu Pendidikan yang dikembangkan

Peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui *Program Banyuwangi Mengajar* merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pengajar melalui pelatihan, mentoring, dan kolaborasi dengan berbagai pihak sangat krusial dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern (Syahrul Riza et al., 2024). *Program Banyuwangi Mengajar* mengimplementasikan pendekatan tersebut dengan mengedepankan pelatihan berkelanjutan bagi para guru, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka.

Sistem pendidikan di Banyuwangi dirancang untuk beradaptasi terhadap kebutuhan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Pandemi

ini telah memengaruhi cara pengajaran dan manajemen pendidikan, mendorong pengenalan metode pembelajaran inovatif seperti penggunaan aplikasi pembelajaran virtual (Yusaini Yusaini et al., 2024). Program ini tidak hanya menyediakan pelatihan teknis, tetapi juga membekali pengajar dengan kemampuan untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan.

Alokasi sumber daya pendidikan juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui penggunaan sistem pendukung keputusan yang mengintegrasikan algoritma AHP dan SAW, alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dioptimalkan untuk mendukung program-program yang meningkatkan kapasitas pengajar (Gina Sania et al., 2024). Hal ini membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Keterlibatan dekan dalam program pendidikan guru juga sangat penting. Dekan berperan dalam memajukan keadilan sosial dan kemandirian pengajar melalui penghapusan hambatan bagi calon guru dan pelaksanaan program-program yang mendukung perubahan sistemik (Kelly León et al., 2024). *Program Banyuwangi Mengajar* mencerminkan upaya tersebut, dengan mendukung guru dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas.

Program ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui administrasi pendidikan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga membantu mengatasi ketimpangan yang ada di dalam sistem pendidikan. Penerapan strategi yang holistik, memanfaatkan teknologi, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Peningkatan kapasitas tenaga pengajar di Banyuwangi melalui administrasi pendidikan merupakan solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan. Regulasi dan peraturan daerah menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program ini. Peraturan Bupati (PERBUP) No. 4 Tahun 2018 menguraikan struktur, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan. Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola

yang efektif, termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Hal ini memastikan bahwa tenaga pengajar mendapatkan dukungan yang memadai dalam pengembangan kompetensi mereka.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang sistem pendidikan juga memainkan peran signifikan. Draf yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi pada tahun 2011 ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan, termasuk ketimpangan akses dan kualitas. Raperda tersebut mengusulkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pendidikan formal dan khusus, serta menekankan peran pendidik dan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan akan memberikan dukungan yang lebih luas untuk para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka.

Program Banyuwangi Mengajar berfungsi sebagai implementasi dari regulasi tersebut, fokus pada peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan program pengembangan profesional. Program ini tidak hanya mengedepankan peningkatan kemampuan pedagogis, tetapi juga mengintegrasikan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat merespons kebutuhan pendidikan yang beragam, terutama di daerah terpencil.

Peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui administrasi pendidikan, sesuai dengan kerangka regulasi, dapat membantu menutup kesenjangan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat pendidikan di daerah yang kurang terlayani, sehingga setiap siswa dapat menerima pendidikan yang berkualitas dan merata. Upaya ini diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik di Banyuwangi, memberikan dampak positif tidak hanya bagi tenaga pengajar, tetapi juga bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan.

Efek Administrasi Pendidikan terhadap Ekonomi Daerah melalui Pengurangan Ketimpangan Pendidikan

Efek administrasi pendidikan terhadap ekonomi daerah dapat dilihat melalui pengurangan ketimpangan pendidikan, terutama dalam konteks *Program Banyuwangi Mengajar*. Teori

Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer menjadi acuan untuk memahami hubungan ini. Teori tersebut menekankan bahwa investasi dalam inovasi, pengetahuan, dan pendidikan merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pendidikan berkualitas berkontribusi signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan di Banyuwangi, melalui *Program Banyuwangi Mengajar*, mampu menghasilkan individu yang lebih terampil dan inovatif. Individu-individu ini, setelah menerima pendidikan yang baik, akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan menciptakan produk baru dan meningkatkan efisiensi produksi. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang memiliki pendidikan yang kuat cenderung lebih mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Administrasi pendidikan berperan penting dalam memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan merata. *Program Banyuwangi Mengajar* memfokuskan upayanya pada daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, sehingga mengurangi ketimpangan pendidikan. Kebijakan yang terintegrasi dan didasarkan pada data yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi yang lebih efektif, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses ke pendidikan berkualitas.

Inovasi dan pengetahuan yang dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas juga berkontribusi pada ekonomi skala. Seiring bertambahnya jumlah individu yang terdidik dan terampil, potensi untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan produktivitas akan meningkat. Pengetahuan yang dihasilkan dari investasi pendidikan di Banyuwangi dapat menciptakan sinergi yang positif antara sektor pendidikan dan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Administrasi pendidikan yang efektif, dalam hal ini melalui *Program Banyuwangi Mengajar*, tidak hanya berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendidikan tetapi juga berperan sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Efek administrasi pendidikan terhadap ekonomi daerah melalui pengurangan ketimpangan pendidikan dapat dijelaskan melalui *Program Banyuwangi Mengajar*. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang terarah memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi regional. Program tersebut berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil yang seringkali terabaikan. Berikut *Flow Chart* efek administrasi pendidikan terhadap ekonomi daerah melalui pengurangan ketimpangan pendidikan yang dikembangkan :



Gambar 3 *Flow Chart* Efek Administrasi Pendidikan terhadap Ekonomi Daerah melalui Pengurangan Ketimpangan Pendidikan yang dikembangkan

Pentingnya pengeluaran pendidikan publik terlihat dalam pengaruhnya terhadap investasi modal manusia. Di China, misalnya, disparitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan mulai menyempit berkat reformasi kebijakan pendidikan, migrasi penduduk, dan industrialisasi (Guo & Li, 2024). Konteks ini serupa dengan apa yang terjadi di Banyuwangi, di mana alokasi sumber daya pendidikan yang tepat mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang sebelumnya kurang beruntung. Melalui *Program Banyuwangi Mengajar*, pemerintah daerah berfokus pada pengurangan ketimpangan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan modal manusia di tingkat lokal.

Program pendidikan jarak jauh, seperti telesekundaris di Meksiko, juga menunjukkan bagaimana inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kinerja siswa dan mengurangi ketimpangan pendidikan (Borghesan & Vasey, 2024). Inspirasi dari program-program seperti ini

dapat diintegrasikan ke dalam strategi pendidikan di Banyuwangi. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, terutama di daerah terpencil, akan memperluas akses belajar dan menciptakan peluang bagi siswa untuk bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif.

Kerja sama regional juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendidikan dan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa kawasan yang memiliki program kolaborasi yang kuat, seperti Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Macao, mampu mempromosikan konvergensi sosial dan ekonomi (Zhang et al., 2024). Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, Banyuwangi dapat mengembangkan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Administrasi pendidikan yang efektif, melalui *Program Banyuwangi Mengajar*, tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan akses pendidikan tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi daerah. Melalui pengurangan ketimpangan pendidikan, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Banyuwangi.

Efek administrasi pendidikan terhadap ekonomi daerah melalui pengurangan ketimpangan pendidikan dapat diuraikan melalui inisiatif yang diambil di Banyuwangi. Berbagai regulasi dan peraturan daerah telah disusun untuk menangani efek tersebut, khususnya Peraturan Bupati (PERBUP) No. 4 Tahun 2018. Regulasi ini merinci struktur, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan, sekaligus menekankan pentingnya tata kelola yang efektif dalam sektor pendidikan. Hal ini mencakup perumusan kebijakan yang sistematis dan evaluasi program pendidikan yang berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi pada tahun 2011 memiliki tujuan untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan, termasuk ketimpangan akses dan kualitas. Raperda tersebut tidak hanya memfokuskan pada pendidikan formal tetapi juga pada pendidikan non-formal, sehingga memperluas cakupan kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan ini, peran pendidik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan

ditekankan, yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif.

Kebijakan ini berfungsi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar. Pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan peningkatan akses ke pendidikan berkualitas diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata di Banyuwangi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi lokal, karena individu yang lebih terdidik cenderung memiliki keterampilan yang lebih tinggi dan mampu berkontribusi secara lebih efektif terhadap ekonomi daerah (Borghesan & Vasey, 2024; Li et al., 2024).

Hal ini menegaskan bahwa administrasi pendidikan, melalui program-program seperti Banyuwangi Mengajar dan regulasi yang mendukung, berperan penting dalam pengurangan ketimpangan pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. *Program Banyuwangi Mengajar* memainkan peran sentral dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas tenaga pengajar. Regulasi yang mendukung menjadi kunci bagi administrasi pendidikan untuk menutup kesenjangan mutu pendidikan, sehingga setiap siswa dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dan merata. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Asmayawati, Yufiarti, & Yetti, E. (2024). Pedagogical innovation and curricular adaptation in enhancing digital literacy: A local wisdom approach for sustainable development in Indonesia context. *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity*, 10(1), 100233. doi:10.1016/j.joitmc.2024.100233
- Bertalanffy, L. V. (1969). *General system theory: Foundations, development, applications*.
- Borghesan, E., & Vasey, G. (2024). The marginal returns to distance education: Evidence from Mexico's telesecundarias. *American Economic Journal. Applied Economics*, 16(1), 253–285. doi:10.1257/app.20220065
- Coleman, J. S. (1968). Equality of educational opportunity. *Integrated education*, 6(5), 19-28.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design. Choosing Among Five Traditions*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi. (2011). *Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan. Banyuwangi*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi. (2011). *Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi*.
- Frola, A., Delprato, M., & Chudgar, A. (2024). Lack of educational access, women's empowerment and spatial education inequality for the Eastern and Western Africa regions. *International Journal of Educational Development*, 104(102939), 102939. doi:10.1016/j.ijedudev.2023.102939
- Ghufron, S., Fitriyah, F. K., Sodikin, M., Saputra, N., Amin, S. M., & Muhimmah, H. A. (2024). Evaluating the impact of teachers' personal and professional resources in elementary education on school-based human resource management: A case study in Indonesia. *SAGE Open*, 14(1). doi:10.1177/21582440241231049
- Guo, Y., & Li, X. (2024). Regional inequality in China's educational development: An urban-rural comparison. *Heliyon*, 10(4), e26249. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e26249
- Jacovkis, J., Rivera-Vargas, P., & Helsper, E. J. (2024). Plataformización de la Educación Pública: Propuestas para abordar las Desigualdades Socio-Digitales y Reforzar el Rol de la Administración Pública en

- Cataluña. *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, 1–19. doi:10.17583/rimcis.12387
- León, K., Rogers, P. M., Quezada, R. L., & Velázquez, S. (2024). A justice oriented examination of teacher education through the lens of deans' innovations and leadership in schools of education. *Journal of Education for Teaching International Research and Pedagogy*, 50(2), 233–249. doi:10.1080/02607476.2023.2296446
- Li, Y., Zhao, X., & Wang, B. (2024). Public education expenditure and corporate human capital: Evidence from China. *Finance Research Letters*, 60(104926), 104926. doi:10.1016/j.frl.2023.104926
- Pambudi, N. A., & Ulfa, D. K. (2024). The geothermal energy landscape in Indonesia: A comprehensive 2023 update on power generation, policies, risks, phase and the role of education. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 189(114008), 114008. doi:10.1016/j.rser.2023.114008
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2018). Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur, Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan. Banyuwangi.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2024. (2024). Tentang Peningkatan Akses Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. (<https://jdih.banyuwangikab.go.id/klinik-jdih/perbup/detail/peraturan-bupati-banyuwangi-nomor-19-tahun-2024-tentang-peningkatan-akses-pendidikan>).
- Peraturan Bupati Banyuwangi. (2018). Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 tentang Struktur, Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
- Riza, S., Syarif, M., Mardatillah, F., Salam, A. J., Khafidah, W., & Yusuf, M. (2024). Improving lecturer competence to encourage innovation and creativity in learning. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(1), 249. doi:10.26811/peuradeun.v12i1.1078
- Riza, S., Syarif, M., Mardatillah, F., Salam, A. J., Khafidah, W., & Yusuf, M. (2024). Improving lecturer competence to encourage innovation and creativity in learning. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(1), 249. doi:10.26811/peuradeun.v12i1.1078
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102.
- Sania, G., Zufria, I., & Fakhriza, M. (2024). Penerapan Metode AHP dan SAW Pada Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Pengalokasian Dana BOS. *Journal of Information Technology*, 4(1), 117–125. doi:10.46229/jifotech.v4i1.869
- Sania, G., Zufria, I., & Fakhriza, M. (2024). Penerapan Metode AHP dan SAW Pada Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Pengalokasian Dana BOS. *Journal of Information Technology*, 4(1), 117–125. doi:10.46229/jifotech.v4i1.869
- Sumarmi, S., Department of Geography, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia, Bachri, S., Purwanto, P., Mutia, T., Sholeha, A. W., ... School of Environment, Asian Institute of Technology, Pathum Thani, Thailand. (2024). Mangrove forest management strategy in Bedul, Banyuwangi: Collaboration between community and Alas Purwo National Park for sustainable ecotourism development. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 52(1), 85–97. doi:10.30892/gtg.52108-1185
- Usman, N., Ar, M., Irani, U., Mylostyvyi, R., & Siswanto, I. (2024). Technoparks as catalyst for sustainable future innovative ecosystem in vocational schools. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(1), 203. doi:10.26811/peuradeun.v12i1.1042
- van de Grift, W. J. C. M., Chun, S., Lee, O., & Kim, D. (2024). Quality of teaching at secondary schools in Nicaragua, South Korea, and the Netherlands. *School Effectiveness and School Improvement : An International Journal of Research, Policy and Practice*, 35(1), 73–93. doi:10.1080/09243453.2024.2319092
- Van Le, D., & Tran, T. Q. (2024). Economic growth and quality of education: Evidence from the national high school exam in Vietnam. *International Journal of Educational Development*, 104(102947), 102947. doi:10.1016/j.ijedudev.2023.102947
- Yusaini, Y., Muslim, B., Rusli, R., Darmawati, D., & Hasyim, S. (2024). Covid-19's effect on lecturer performance and management functions in educational implementation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(2), 613. doi:10.26811/peuradeun.v12i2.1185

- Zhang, X., Lu, Y., Xu, Y., Zhou, C., & Zou, Y. (2024). Governing regional inequality through regional cooperation? A case study of the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay area. *Applied Geography* (Sevenoaks, England), 162(103135), 103135. doi:10.1016/j.apgeog.2023.103135
- Zhao, W. (2024). A study of the impact of the new digital divide on the ICT competences of rural and urban secondary school teachers in China. *Heliyon*, 10(7), e29186. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e29186